

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA  
(ASN)**

(Studi di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan  
Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung)

**SKRIPSI**

**(Dibuat guna memenuhi syarat mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum pada Jurusan Siyasa Syari'yyah  
Fakultas Syari'ah)**

Disusun Oleh :

**HANI TRIANARA**

**NPM : 1721020338**



**SIYASAH SYARI'YYAH (HUKUM TATA NEGARA)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442H/2021M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA  
(ASN)**

(Studi di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan  
Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung)

**SKRIPSI**

**(Dibuat guna memenuhi syarat mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum pada Jurusan Siyasa Syari'yyah  
Fakultas Syari'ah)**

Disusun Oleh :

**HANI TRIANARA**

**NPM : 1721020338**

**Dosen Pembimbing 1: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**Dosen Pembimbing II: Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.**

**SIYASAH SYARI'YYAH (HUKUM TATA NEGARA)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442H/2021M**

## ABSTRAK

Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kunci keberhasilan pemerintah dalam keberhasilan kerja, baik dalam hal kinerja aparatur, waktu kerja pegawai sampai kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui unit kerja. Sebelumnya hal tersebut belum secara optimal diterapkan di instansi tersebut. Disiplin aparatur sipil negara menjadi salah satu langkah yang diambil Kelurahan Sumberrejo Sejahtera dari awal pemekaran sampai sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu : (1) *Bagaimana hukum Islam dan hukum Positif memandang disiplin ASN dalam upaya pelayanan masyarakat pasca pemekaran wilayah.* (2) *Bagaimana UU ASN Mengatur Etika dan Perilaku Disiplin ASN dalam Upaya Pelayanan Masyarakat Pasca Pemekaran Wilayah?*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode Kualitatif atau penelitian yang datanya langsung diperoleh dari lapangan, yaitu data yang langsung didapat dari sumber pertama dalam hal ini adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan instansi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi yang dilakukan kepada seluruh populasi yang menjadi sampel penelitian yaitu : Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kelurahan Sumberrejo Sejahtera berjumlah 6 orang.

Hasil penelitian ini berupa : (1) Pegawai masih belum mengoptimalkan kinerjanya sehingga belum dapat mengembangkan kariernya sebagai aparatur sipil (ASN) negara yang kreatif dan inovatif, 2. Masih ditemukan pegawai yang belum memperhatikan waktu kehadirannya untuk pengoptimalan kerja dan kelancaran jam oprasional di kelurahan, 3. Pegawai masih ada yang meninggalkan ibadahnya untuk shalat pada saat diberikan waktu istirahat kerja, 4. Pegawai sudah menerapkan sistem pelayanan prima bagi masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan mudah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan 5. Sudah pernah terjadi hukuman disiplin yang dilakukan yang membuat jabatan Lurah diisi oleh Camat selaku Plt untuk kelurahan Sumberrejo Sejahtera. (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur sikap disiplin ASN dengan pelaksanaannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara yang

mengatur etika dan perilaku atau dalam hukum Islam disebut Adab dalam pelayanan masyarakat. Peraturan perundang-undangan ini berlaku sejak pasca pemekaran wilayah kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kota Bandar Lampung, sehingga peraturan ini mengikat dan patut ditaati oleh pegawai negeri sipil yang bekerja di kelurahan ini baik pasca pemekaran sampai dengan sekarang selama peraturan perundang-undangan tersebut diberlakukan.

**Kata Kunci : Perilaku Disiplin ASN, Disiplin ASN, dan Pasca Pemekaran Wilayah**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : HANI TRIANARA**

**NPM : 1721020338**

**Jurusan/Prodi : HUKUM TATA NEGARA (*Siyasah Syari'yyah*)**

**Fakultas : SYARIAH**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “***TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Studi di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung)***” adalah benar hasil karya penyusunan saya sendiri, bukan merupakan hasil duplikasi ataupun tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang lain telah merujuk dan disebut dalam catatan kaki pada daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan sampaikan agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung,  
31 Maret 2021  
Peneliti,

**Hani Trianara**  
**NPM. 1721020338**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

(Q.S. An-Nahl [16] : 90)



## PERSEMBAHAN

Ucapan syukur saya kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga melancarkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

1. Mamak saya Purwati, ayah saya Burman yang mendidik saya dan merawat saya;
2. Mbak saya Yuanita, abang saya Yuki Herlando, dan adik saya Della Triandini yang Jessy mendukung saya dan selalu mengarahkan saya;
3. Sahara Puspa Amalia sahabat dan teman karib saya yang selalu menyemangati saya untuk selalu bersabar;
4. Anggi Apriliana, Riska Restiana, Nurul Azizah dan kak Liyanna Aprilianni yang selalu menyemangati saya untuk terus berusaha;
5. Kak Edi Sudrajat dan kak Ahmad Arief biang kerecokan tetap mendukung terus untuk terselesaikannya skripsi ini.
6. Serta Almamater saya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Hani Trianara, lahir di Bandar Lampung hari minggu pada tanggal 14 Maret 1999, anak ketiga dari empat bersaudara. Mempunyai ibu bernama Purwati dan ayah bernama Burman. Beralamat di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Telah menempuh jenjang pendidikan sebagai berikut :

1. TK Beringin Raya, Kota Bandar Lampung Tahun 2004;
2. SDN 5 Sumberrejo, Kota Bandar Lampung Tahun 2005;
3. SMPN 28 Bandar Lampung Tahun 2011;
4. SMAN 7 Bandar Lampung Tahun 2014;

Di tahun 2017 peneliti diterima untuk berkuliah di Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) menempuh jalur seleksi yaitu : Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN).

Bandar Lampung, 31 Maret 2021  
Yang Membuat,

**Hani Trianara**



## KATA PENGANTAR

Sangat bersyukur kepada ALLAH SWT. telah memberikan saya Rahmat-NYA hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya sampai skripsi ini selesai dengan baik. Mengingat skripsi saya yang berjudul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Studi di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)”*** adalah salah satu syarat saya memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan *Siyasah Syari’yyah*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Menyadari sepenuhnya bahwa dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, kritik dan saran dari segala pihak yang terlibat. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung;
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung. Sekaligus sebagai pembimbing I saya dalam skripsi ini;
5. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Siyasah Syari’yyah, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung;
6. Bapak Ahmad Burhanuddin, M.H.I. selaku Pembimbing II saya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
8. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan baik yang berada di Akademik dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
9. Kakak-kakak DKC Kota Bandar Lampung, kak Nanik Oktavia, kak Octridinata, kak Dewi Fitriani, kak Della Meliysa, kak Liyanna Aprilianni, kak Desti, kak Hardi, kak Ekid, kak Wangga, Dian Purwohadi Pusporini, kak Asrul Gunawan dan kak Liyana atas pengalaman dan dukungannya;

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata baik, oleh karena ini peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. peneliti berharap, skripsi ini dapat menjadi manfaat serta bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan penulis khususnya.

Bandar Lampung, 31 Maret 2021  
Yang Membuat,

**Hani Trianara**

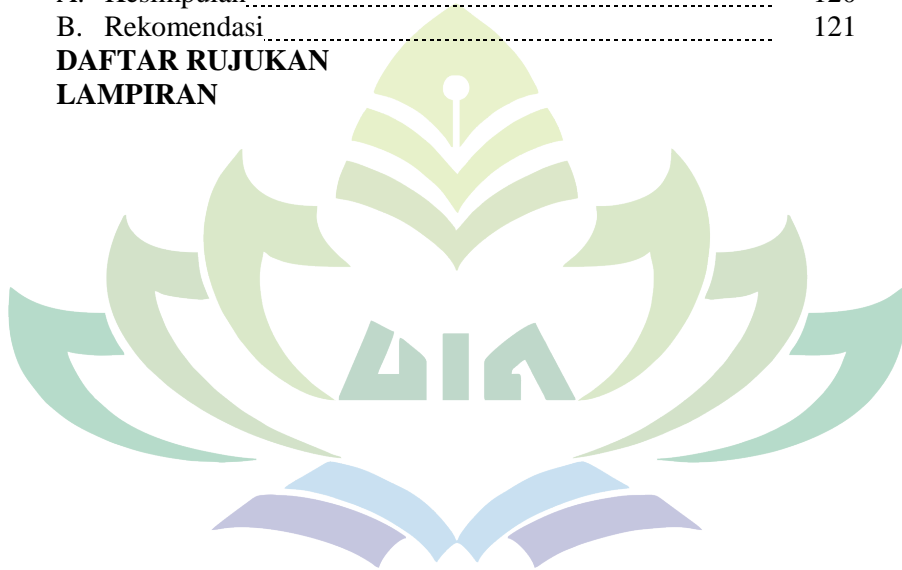


## DAFTAR ISI

Halaman	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB. II LANDASAN TEORI</b>	
A. Definisi Disiplin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	20
B. Definisi Aparatur Sipil Negara dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	22
C. Asas-Asas Aparatur Sipil Negara pada Hukum Islam dan Hukum Positif .....	25
D. Definisi Pemekaran Wilayah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	30
E. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia .....	32
1. Pengertian ASN pada Peraturan Perundang-Undangan .....	32
2. Prinsip dan Asas Pada Kode Etik dan Perilaku ASN .....	32
3. Etika dan Perilaku ASN .....	34

4. Hak dan Kewajiban ASN dalam Melayani Masyarakat.....	35
5. Disiplin ASN pada Peraturan Perundang-Undangan.....	37
6. Hukuman Disiplin bagi ASN yang Melakukan Pelanggaran.....	38
F. Pengukuran Perilaku Disiplin.....	39
1. Waktu Kehadiran.....	39
2. Indeks Kinerja.....	40
3. Pelayanan Kepada Masyarakat.....	41
G. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN yang Melakukan Pelanggaran.....	42
<b>BAB. III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.....	46
1. Sejarah Berdirinya Kelurahan.....	46
2. Visi dan Misi.....	47
3. Program Kerja.....	49
4. Wilayah Administrasi.....	51
5. Jumlah ASN yang Dipekerjakan.....	53
6. Struktur Kepengurusan ASN.....	54
7. Aspek Pelayanan.....	56
8. Jumlah Penduduk.....	60
9. Jam Kerja ASN.....	64
B. Hasil Penelitian Disiplin ASN dalam Upaya Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.....	66
1. Tingkat kedisiplinan ASN.....	66
2. Program yang Dikembangkan dalam Upaya Pelayanan Masyarakat.....	70
3. Asas-Asas Disiplin ASN pada UU Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang telah Diterapkan dalam Visi dan Misi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.....	71
4. Pembagian Tugas bagi Pegawai ASN dalam Penanganan Pelayanan Masyarakat.....	78
5. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.....	85
6. Hak dan Kewajiban ASN yang Dilaksanakan di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.....	96

7. Kondisi Pelayanan Masyarakat .....	98
1. Sebelum Pandemi Covid-19.....	100
2. Saat Pandemi Covid-19.....	100
<b>BAB. IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.....	102
B. Analisis Terhadap Etika dan Perilaku pada Disiplin ASN dalam Upaya Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.....	110
<b>BAB. V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	120
B. Rekomendasi.....	121
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 : Daftar Pejabat Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Periode 2012 Sampai 2020.....	47
3.2 : Letak Geografi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.....	47
3.3 : Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Periode 2020.....	53
3.4 : Laporan Jumlah Kependudukan Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kepala Keluarga dan Jumlah Laki-Laki/Perempuan Periode Oktober 2020.....	61
3.5 : Laporan Jumlah Kependudukan Kelurahan SumberrejoSejahtera Kelahiran dan Kematian yang Terjadi Periode Oktober 2020.....	61
3.6 : Laporan Jumlah Kependudukan Kelurahan SumberrejoSejahtera Kedatangan dan Kepindahan Periode Oktober 2020.....	62
3.7 : Laporan Jumlah Kependudukan Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Jumlah Total Penduduk Akhir Periode Oktober 2020.....	62
3.8 : Laporan Jumlah Kependudukan Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Golongan Umur Periode Oktober-Desember 2020.....	62
3.9 : Laporan Jumlah Kependudukan Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Tingkat Pendidikan Periode Oktober-Desember 2020.....	63
3.10 : Laporan Jumlah Kependudukan Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Mata Pencaharian Periode Oktober-Desember2020.....	63
3.11 : Laporan Jumlah Kependudukan Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Agama yang Dianut Periode Oktober-Desember 2020.....	63
3.12 : Waktu Kerja Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung Sebelum Pandemi Covid-19.....	64
3.13 : Waktu Kerja Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera,Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung Sebelum Pandemi Covid-19.....	65
3.14 : Absen Kehadiran ASN Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Periode 2020-2021.....	69
3.15 : Kondisi Pelayanan Masyarakat yang Terdapat di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.....	100

4.16 : Peraturan Mengenai Sikap Disiplin ASN pada Pelayanan Masyarakat.....	109
--	-----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 : Wilayah Administrasi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling.....	52
3.2 : Struktur Kepengurusan ASN Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.....	55
3.3 : Mekanisme Pembagian Tugas dalam Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling.....	80
3.4 : Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi ASN di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.....	91
3.5 : Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Pemerintahan Menurut Hukum Islam.....	93
3.6 : Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.....	96
3.7 : Indikator Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja ASN di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.....	101
4.8 : Jumlah Pelayanan yang Dilakukan oleh ASN di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Periode Oktober 2020-Januari 2021.....	108





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 : Foto Kelurahan Pasca Pemekaran dan Sekarang.....	127
Lampiran 2 : Bukti Tulisan-Tulisan pada Saat Wawancara.....	128
Lampiran 3 : Bukti Dokumentasi Wawancara.....	131
Lampiran 4 : Profile Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.....	132
Lampiran 5 : Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Perilaku Disiplin ASN.....	133
Lampiran 6 : Jadwal Kerja ASN di Google Maps yang dapat di Akses oleh Masyarakat.....	138
Lampiran 7 : Data Masyarakat yang Melakukan Pelayanan di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.....	139
Lampiran 8 : Surat Izin Riset dari Kasbangpol Kota Bandar Lampung.....	140
Lampiran 9 : Surat Izin Riset dari Kecamatan Kemiling.....	141
Lampiran 10 : Surat Izin Riset dari Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.....	142
Lampiran 11 : Hasil Wawancara ASN DI Kelurahan Sumberrejo Sejahtera dalam bentuk format ketikan.....	143
Lampiran 12 : Lembar Bimbingan PA 1.....	146
Lampiran 13 : Lembar Bimbingan PA 2.....	147

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk lebih mudah memahami terkait dengan judul skripsi ini, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman maka terlebih dahulu akan dijelaskan secara singkat istilah-istilah yang akan muncul dalam skripsi ini yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)”***. Istilah-istilah pada judul yang akan dijelaskan, sebagai berikut :

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam disini lebih mengarah kepada Fiqh Siyasah yaitu seperangkat ilmu yang mempelajari peraturan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan pemerintah berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukkalaf* yang diakui dan diyakini untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Positif

Adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang atau berdaulat, yang diterapkan dalam masyarakat pada tempat dan waktu tertentu yang dilengkapi dengan sanksi yang dapat dipaksakan oleh penguasa bila hukum positif itu dilanggar.<sup>2</sup> Dasar yang akan muncul ada pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

#### 3. Disiplin Aparatur Sipil Negara

Disiplin adalah kataatan pada peraturan atau tata tertib atau sebuah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya sebagai tanggung jawabnya.<sup>3</sup> Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *“Ushul Fiqh”* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2014), Cet. Ke – 5, 6.

<sup>2</sup> A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG.NG. Indra S. Ranuh, *“Teori Hukum”* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 65.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Bahasa Indonesia”* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 358.

yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>4</sup> Maka Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.<sup>5</sup>

#### 4. Pemekaran Wilayah

Adalah sebuah istilah dalam pembentukan daerah dalam undang-undang, dimana terjadi pemecahan daerah yang membentuk suatu daerah baru dengan syarat : luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batasan wilayah, cakupan wilayah, dan batas minimal daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan kecamatan.<sup>6</sup>

Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah *meninjau Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung menurut ketentuan yang dimuat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*.

### B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjalankan pemerintahannya dengan cara melimpahkan kewenangannya kepada pemerintahan di bawahnya untuk kemudian dijalankan oleh orang-orang yang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pelayanan masyarakat yang berkelanjutan. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki Disiplin Aparatur Sipil Negara guna membatasi ASN dalam beretika dan berperilaku, sehingga upaya pelayanan masyarakat akan stabil dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Disiplin Aparatur Sipil Negara menjadi faktor pendukung

<sup>4</sup> BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 (Angka 1), "Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara".

<sup>5</sup> "Pasal 1 Ayat (1), 'Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil'".

<sup>6</sup> Pasal 32 Bagian 2, "Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah".

keberhasilan kelancaran penyelenggaraan tugas dan penyelenggaraan nasional di Indonesia untuk mewujudkan *masyarakat Civil/ Civil Society* (istilah Hukum Positif) atau *masyarakat Madani* (istilah Hukum Islam) yaitu : *suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik, sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan dengan berpegang pada hukum, demokratis, berkeadilan, bermoral dan berbudi pekerti luhur.*<sup>7</sup>

Peran Aparatur Sipil Negara sangat diperlukan sebagai abdi masyarakat yang mengupayakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mengerahkan segala upaya yang mengarah kepada keadilan yang merata untuk semua kalangan dalam masyarakat berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pastinya.

Keberhasilan sebuah negara dilihat dari kinerja Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam upaya pelayanan masyarakat yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat yang mendukung lahirnya demokrasi.

Hukum Islam memandang perannya sangat penting terutama menjalankan Asas Keadilan, Asas Kejujuran, Asas Transparansi, Asas Bertanggung Jawab, dan Asas Amal Ma'ruf Nahi Munkar. Bahkan di dalam Hukum Positif yang berlaku asas yang sama pentingnya dengan asas pada Hukum Islam bagi Disiplin Aparatur Sipil Negara, yaitu : Kepatitan hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabelitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan dan kesejahteraan<sup>8</sup> dalam upaya pelayanan masyarakat agar semakin menjadi lebih baik lagi.

Pemekaran wilayah yang terjadi sudah pasti akan menimbulkan sebuah pergeseran etika dan perilaku yang dimiliki seorang ASN, ini karena cakupan wilayah yang baru akan menuntut pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik dari

---

<sup>7</sup>Sahya Anggara, "*Sstem Politik Indonesia*" (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 122.

<sup>8</sup>BAB II Pasal 2 (Huruf a-m), "*Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*".

sebelumnya. Akan ada pendataan ulang masyarakat, pengaturan kembali program kerja bagi ASN dan semua ini menciptakan perubahan yang cukup besar bagi wilayah pemekaran. Maka, Disiplin Aparatur Sipil Negara harus cukup jitu dalam upaya pelayanan masyarakat. Sehingga tidak akan menimbulkan ketimpangan sosial dalam lingkungan masyarakat.

Seorang Aparatur Sipil Negara adalah pemimpin bagi lingkungan instansinya dan juga masyarakat. Disiplin Aparatur Sipil Negara hadir sebagai cerminan bagi keberhasilan penyelenggaraan tugas negara dan sebagai bentuk dari etos kerja bagi pegawai negeri sipil dalam upaya pelayanan masyarakat sehingga terwujudnya *Good and Clean Governance*<sup>9</sup> dengan prinsip-prinsipnya yaitu : Partisipasi, *Rule of law* (berbasis hukum), *Transparency* (keterbukaan), Orientasi konsensus, *Equity* (kesetaraan), Efektif dan Efisien, Akuntabel dan Responsif.

Setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap *Stakeholders*. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial kualifikasi etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional.

Adapun etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Ini karena *Good and Clean Governance* dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh tiga unsur yang saling terkait : Unsur negara, Unsur swasta dan unsur masyarakat sipil. Termasuk di dalamnya peran Aparatur Sipil Negara. Kelurahan Sumberrejo Sejahtera adalah contoh pemekaran wilayah yang terjadi dalam lingkup Kecamatan Kemiling.

Kelurahan tersebut harus menciptakan perubahan baru dengan tetap berpegang pada Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam upaya pelayanan masyarakat agar masyarakat dapat

---

<sup>9</sup>A. Ubaedillah, “*Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*” (Jakarta : KENCANA, 2015), Cet. Ke – 2, 211.

menjalankan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemekaran wilayah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemerintah terkait upaya pelayanan masyarakat bagi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera.

Hukum Islam mengatur mengenai sikap disiplin sebagai ketaatan pada aturan hukum yang ada, sebagaimana tertuang dalam kandungan Al-Qur'an Surah Muhammad : Ayat 21, berbunyi sebagai berikut:

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ ٢١

*“Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.” (Q.S. Muhammad [47] : 21)<sup>10</sup>*

Bersikap ramah, sopan, santun dan bijaksana dalam melaksanakan tugas menjadi kunci pengupayaan yang harus dilakukan pegawai dalam hal Disiplin bagi ASN. Karena Aparatur Sipil Negara akan menjadi tolak ukur keberhasilan instansi pemerintah pada lingkungan baru dapat cepat menyelesaikan dengan program kerja yang telah ada dan dibuat. Terutama dalam jam kerja, waktu menjadi hal penting dalam sebuah pelayanan masyarakat oleh karena itu Hukum Islam pun mengatur mengenai pemanfaatan waktu agar usaha dan pekerjaan yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia, sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Ashr : Ayat 1 – 3, berbunyi sebagai berikut :

وَالْعَصْرِ ۝ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝ ٣

*“Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan*

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahan” (Bandung : CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 254.

*mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*” (Q.S. Al-Ashr [103] : 1- 3)<sup>11</sup>

Begitu juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 8 huruf d, berbunyi : *“Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas”*.<sup>12</sup> Setiap jenis pekerjaan, pada dasarnya menuntut tanggung jawab yang berbeda hanya besar kecil ukuran dan ruang lingkup tanggung jawab tersebut. Tergantung pada tinggi rendahnya jabatan yang diemban oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2, yaitu : *“Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari”*.

Kelurahan Sumberrejo Sejahtera yang berada di lingkungan Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung merupakan lingkungan Kelurahan yang baru atau hasil pemekaran wilayah Kecamatan Kemiling yang terbentuk pada Tahun 2018 dan resmi beroperasi menggunakan gedung kantornya pada Kamis, 30 Januari 2020. Belum juga terdapat peningkatan secara signifikan atau belum memberikan dampak yang cukup besar bagi peningkatan upaya pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera. Maka, diperlukan adaptasi etika dan perilaku yang ditingkatkan melalui disiplin dalam upaya pelayanan masyarakat, dilakukan secara maksimal dan lebih baik dari kelurahan yang sudah lama ada sebelumnya.

Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera harus lebih diawasi agar pegawai dapat melayani masyarakat sesuai dengan kode etik dan perilaku berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan

---

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *“Al-Qur'an Dan Terjemahan”* (Bandung : CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 304.

<sup>12</sup> Pasal 8 Huruf d, *“PP Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil”*.

terhindar dari pelanggaran yang mengakibatkan dijatuhinya hukuman disiplin.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting untuk diteliti dalam penelitian skripsi ini dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung).”*

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Peneliti dalam penelitian ini akan mengidentifikasi dan memberikan batasan dalam menjawab rumusan masalah dengan memfokuskan masalah penelitian ini pada Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasca Pemekaran Wilayah di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana Perilaku Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pelayanan Masyarakat Pasca Pemekaran Wilayah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perilaku Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pelayanan Masyarakat Pasca Pemekaran Wilayah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Mengetahui perilaku Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pelayanan masyarakat pasca pemekaran

---

<sup>13</sup> Wawancara terhadap Ketua Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, pada hari senin, tanggal 11 Mei 2020, pukul 08.32 WIB, didukung dengan data pada laman desa/kampung/pekon/kelurahan di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung (2 April 2020).



wilayah di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung.

2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam upaya pelayanan masyarakat pasca pemekaran wilayah di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Pentingnya penelitian tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam upaya pelayanan masyarakat dengan penerapan aturan yang mengatur perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga tidak ada sanksi disiplin yang perlu dijatuhkan. Penelitian ini juga dilakukan agar pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang berlaku bagi Pegawai ASN.

Tentunya pada setiap penelitian akan melahirkan sebuah manfaat dan akan menjadikan manfaat ini sebagai dasar untuk digunakan baik untuk peneliti maupun untuk kontribusi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan jurusan penelitian. Manfaat dari penelitian yang diteliti ini antara lain :

1. Secara *Teoritis*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Disiplin Aparatur Sipil Negara terutama pada bidang Hukum Administrasi Negara, juga akademis hukum meliputi analisis secara hukum Islam dan hukum positif tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung.
2. Secara *Praktis*, penelitian ini dapat memberi kegunaan dalam menggali asas-asas perilaku Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kehidupan sosial masyarakat di negara hukum.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pada dasarnya setiap penelitian dilakukan dikarenakan sudah terdapatnya penelitian yang jauh lebih dahulu meneliti. Adanya penelitian baru yang dilakukan bermaksud mengungkapkan dan mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang timbul dikemudian hari, dimana dunia akan selalu berkembang seiring waktu berjalan. Masalah selalu timbul dan harus memiliki pemecahan masalahnya atau pengidentifikasiannya, sehingga sebuah masalah yang baru timbul ini dapat dipemahaman dengan jelas.

Keberadaan penelitian yang terdahulu dan relevan dengan penelitian ini, menjadi pendukung bagi peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan juga penelitian yang relevan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti untuk melihat dan mengamati apakah penelitian terdahulu ini masih terdapat di lapangan dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Penelitian ini, sudah terdapat banyak pembahasan yang relevan dengan judul penelitian ini. mulai dari beragamnya pembahasan terkait tenaga kerja pemerintah atau yang sering disebut Aparatur pemerintah. Kajian tersebut memiliki kerelevanan dengan penelitian ini karena penelitian ini membahas mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada dasarnya merupakan tenaga kerja pemerintah.

Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, seperti : dijelaskan dalam skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung lulusan tahun 2013 yaitu Nurfadhil Putra beliau membahas mengenai “Implementasi dari Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Lampung Utara”.<sup>14</sup>

Penelitiannya mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan jelas. Namun penelitian tersebut hanya mengungkapkan dan berfokus kepada waktu kerja dari pada pegawai dinas tersebut. Ada juga skripsi mahasiswa UIN Raden

---

<sup>14</sup> Nurfadhil Putra, “*Implementasi Dari Disiplin Aparatur Sipil Negara*” (Skripsi, Lampung Utara : UIN RIL, 2013).

Intan Lampung pada tahun 2015 yang membahas mengenai tenaga kerja pemerintah yaitu diteliti oleh Risnanda Fajri beliau mengangkat judul mengenai “Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”.<sup>15</sup> Penelitian ini mendukung dan cukup relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Karena dalam sebuah proses terjadinya sistem pelayanan maka sebuah instansi akan menuntut pegawai atau tenaga kerjanya untuk memaksimalkan sebuah kinerja yang jika tidak terjadi dengan seimbang akan menimbulkan sebuah guncangan atau masalah bagi pegawai yang bekerja, timbulah sebuah hukuman atau ketegasan bagi pejabat instansi untuk melakukan pemberhentian melalui penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai dan bukan tidak mungkin terjadi pengangkatan tenaga kerja baru untuk menunjang kinerja yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Penelitian lain dikemukakan oleh Harris Pratama pada skripsinya berjudul “Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”<sup>16</sup>

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuyu Yunus Hasan, beliau mengangkat judul skripsi yaitu “Pengaruh Motivasi dan Penerapan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas Kota Timus, Kota Gorontalo.”<sup>17</sup> Kajian penelitian terdahulu tersebut memiliki identifikasi dan batasan masalah yang berbeda dengan penelitian ini. Namun sangat mendukung bagi penelitian ini sebagai sumber informasi dan sebagai kekuatan bahwa peraturan yang berkembang dan

---

<sup>15</sup> Risnanda Fajri, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa" (Skripsi, Lampung Selatan : UIN RIL, 2015”).

<sup>16</sup> Harris Pratama, "Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil" (Skripsi, Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh, 2020), [Http://Repository.Unmuha.Ac.Id:8080/Xmlui/Handle/123456789/790](http://Repository.Unmuha.Ac.Id:8080/Xmlui/Handle/123456789/790)”.

<sup>17</sup> Yuyu Yunus Hasan, "Pengaruh Motivasi Dan Penerapan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas Kota Timus, Kota Gorontalo" (Skripsi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2017), [Https://Repository.Ung.Ac.Id/Skripsi/Show/811412085](https://Repository.Ung.Ac.Id/Skripsi/Show/811412085)”.

masalah yang berkembang mengenai tenaga kerja pemerintah akan selalu terjadi seiring berjalannya waktu dan juga merupakan tuntutan zaman sebagai proses perkembangan bagi dunia pemerintahan.

Dr. Ismail Nurdin mengatakan : Tuntutan publik terhadap tampilan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang beretika dan melayani semakin tinggi, karenanya pemahaman tata kelola pemerintahan yang beretika menjadi penting untuk mewujudkan pemerintah yang dipercaya.<sup>18</sup>

Kenyataannya, pernyataan beliau sedikit banyak menjawab pertanyaan publik yang menanyakan pelayanan masyarakat yang diberikan pegawai harus beretika dan bermasyarakat. Teori yang merupakan pernyataannya menjadi pendukung bagi penelitian ini untuk terus menyelesaikan dan mengidentifikasi permasalahan mengenai etika dan perilaku ASN terutama di tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di Kantor Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

## H. Metode Penelitian

Di dalam kegiatan penelitian, sebuah metode merupakan komponen terpenting yang menentukan sebuah penelitian dapat berjalan dengan baik atau tidak sampai kepada memperoleh hasil yang final dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang akurat dan dapat diuji kebenarannya, sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang dapat mendukung sekaligus berkaitan dengan apa yang akan dibahas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan sebuah metode yang diantaranya perlu memperhatikan, sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan atau dikenal dengan istilah *Field Research* yaitu, penelitian ini dilakukan dalam arti dapat berupa wilayah

---

<sup>18</sup> Ismail Nurdin, “*Etika Pemerintahan*” (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 32.

tertentu (desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya), lembaga/instansi atau organisasi kemasyarakatan, serta objek-objek alami atau fenomena-fenomena yang ada di lapangan seperti : kondisi geografis.<sup>19</sup> Atau penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>20</sup>

b. Sifat Penelitian

Melihat sifatnya, penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu penelitian yang lebih mengarah kepada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis dan hasil penelitiannya difokuskan untuk memberikan gambaran keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.<sup>21</sup>

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu, data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Data ini mempunyai peranan untuk menjelaskan secara deskriptif suatu masalah. Sumber data pada penelitian ini merujuk pada 2 (dua) jenis sumber data, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu berasal dari bahan hukum yang memiliki otoritas artinya bersifat mengikat. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>22</sup> Data ini juga berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).<sup>23</sup> Penelitian ini di dapat dari obesrvasi dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada

---

<sup>19</sup> Moh. Pabundu Tika, “*Metode Penelitian*” Geografi (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), 9.

<sup>20</sup> Susiadi. AS, “*Metodologi Penelitian*” (Bandar Lampung : Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Lampung, 2014), 9.

<sup>21</sup> Moh. Pabundu Tika, “*Metode Penelitian Geografi*” ....., 4.

<sup>22</sup> Amaruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif* “ (Jakarta : PT. RajaGrafinfo Persada, 2013), 29.

objek penelitian dan juga di dapat melalui hasil tanya jawab dengan responden dalam bentuk wawancara.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap secara maksimal pada penelitian ini, maka peneliti dalam penelitian ini mempergunakan 4 (empat) metode yaitu :

- a. Observasi, yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>25</sup> Penelitian ini akan mengamati dan mencatat Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam upaya pelayanan masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung.
- b. Wawancara, yaitu menurut Prof. Dr. S. Nasution, M.A. adalah (interview) suatu bentuk komunikasi verbal. Semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan pada tujuan penelitian.<sup>26</sup> Dalam melakukan wawancara setiap pihak memiliki kedudukan yang berlainan, *pihak pertama* sebagai peminta informasi dan *pihak lainnya* sebagai pemberi informasi.

Peneliti dalam melakukan wawancara ini mempergunakan jenis *wawancara tidak berstruktur* maksudnya adalah peneliti tidak menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan memiliki arah dan dituntun dengan garis besar dari informasi yang ingin didapat untuk

<sup>24</sup> Marzuki, “*Metodologi Riset*” (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983), 86.

<sup>25</sup> Moh. Pabundu Tika, “*Metode Penelitian Geografi*” ..., 44.

<sup>26</sup> Moh. Pabundu Tika, “*Metode Penelitian Geografi*” ..., 49.

diwawancarakan dan dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Populasi pada penelitian berjumlah 6 orang ASN dimana sebanyak 6 orang ASN tersebut menjadi sample untuk diwawancara. Sample tersebut adalah orang yang memiliki pengetahuan dan berkapasitas dalam memberikan informasi mengenai Disiplin Aparatur Negeri Sipil dalam Upaya Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung.

- c. Dokumentasi, yaitu bentuk data sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen ini dapat berupa : Tulisan, gambar, atau karya monumental dari objek yang diteliti.<sup>27</sup>
- d. Pengumpulan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari subjek atau objek yang diteliti, tetapi melalui pihak lain seperti : Instansi atau lembaga terkait, perpustakaan, arsip perseorangan, dan sebagainya.<sup>28</sup>

#### 4. Metode Pengolahan Data

Secara umum pengelolaan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data di lapangan yang kemudian setelah terkumpul secara lengkap maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian dapat dimasukkan kedalam hasil penelitian ini. Terdapat 3 (tiga) metode pengolahan data dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Pemeriksaan Data (Editing), yaitu Pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar, dan relevan. Karena kemungkinan data yang masuk tidak logis dan meragukan dengan judul penelitian.<sup>29</sup> Sehingga penelitian dapat berfokus kepada pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

---

<sup>27</sup> Thalha Alhamid, Budur Anufia, "Resume Instrumen Pengumpul Data", Jurnal STAIN Sorong (2019), 11, Diakses Pada Rabu Tanggal 13 Mei 2020, Pukul : 09.45. Wib."

<sup>28</sup> Moh. Pabundu Tika, "Metode Penelitian Geografi", 60.

<sup>29</sup> Susiadi. AS, "Metodologi Penelitian" ..., 115.

- b. Pendataan Data (Coding), yaitu usaha mengklasifikasi jawaban dari responden menurut macamnya dengan dilakukan secara konsisten karena hal tersebut sangat menentukan reliabilitas.<sup>30</sup>
- c. Sistematis Data (Sistematika), yaitu menempatkan data sesuai menurut kerangka sistematika bahan data berdasarkan urutan masalah.<sup>31</sup>

## 5. Analisis Data

Setelah data telah terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisis data yang digunakan yaitu : *Analisis Kualitatif* yaitu dimana data yang telah terkumpul setelah diolah penulis uraikan dan berpijak pada landasan teori dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis dan efektif sehingga mudah untuk diinterpretasikan data dengan pemahaman hasil analisis.<sup>32</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan cara menjelaskan sejelas-jelasnya, terperinci dan akurat serta disusun secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dari upaya pemecahan masalah dan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini akan dibahas mengenai : penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini memuat semua teori yang berkaitan dengan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

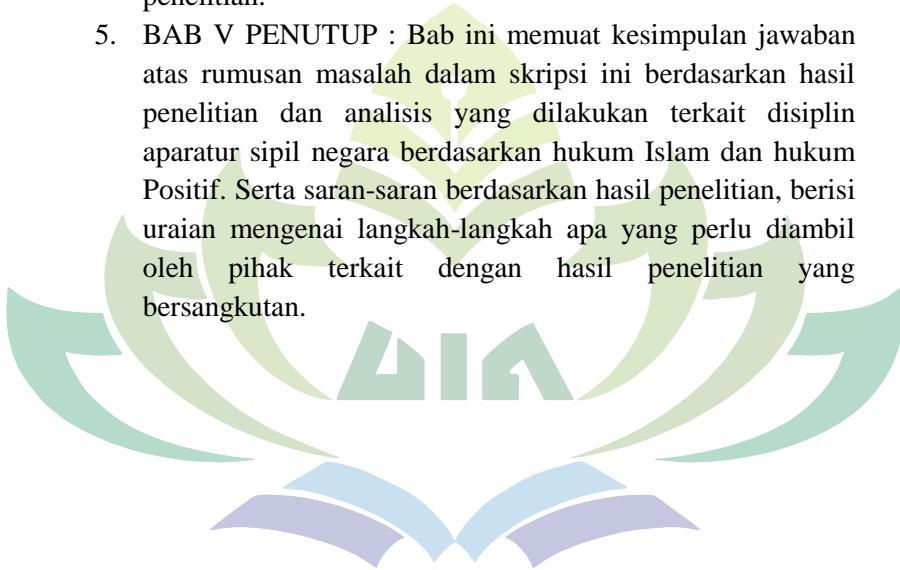
<sup>30</sup> Moh. Pabundu Tika, “*Metode Penelitian Geografi*” ..., 64.

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum Dan Penelitian*” (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), 45.

<sup>32</sup> Abdul Kadir Muhammad, Ibid,....., 23.



3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN : Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum tempat penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukan di kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN : Bab ini memuat tentang analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap disiplin aparatur sipil negara dalam upaya pelayanan masyarakat di kelurahan Sumberrejo Sejahtera. Serta analisis etika dan perilaku disiplin ASN di tempat penelitian.
5. BAB V PENUTUP : Bab ini memuat kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terkait disiplin aparatur sipil negara berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif. Serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Definisi Disiplin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Istilah Disiplin dalam Hukum Islam dikenal dengan sebuah bentuk “Ketaatan” pada perintah-perintah Allah Swt yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah atau Hadist Nabi. Seperti yang ada dalam Q.S. An-Nisa’ Ayat 59, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’ [04] : 59)<sup>33</sup>*

Disiplin dalam hukum Islam adalah sebuah bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah Swt melalui Al-Qur’an dan Sunnah atau Hadist Nabi yang dijadikan pedoman setiap manusia agar mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Istilah Disiplin dalam Hukum Positif dikenal sebagai kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan. Penjelasan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 Angka 1 berbunyi :

*“Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang*

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, “Al- Hikmah Al-Qur’an Dan Terjemahan” (Bandung : CV. Diponegoro, 2010), Cet. Ke- 10, 87.

*apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.*"<sup>34</sup>

Disiplin juga dapat diartikan sebagai kondisi untuk melakukan koreksi atau menghukum pegawai yang melakukan pelanggaran yang telah ditentukan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi.<sup>35</sup> Disiplin meliputi perilaku seorang ASN dari ucapannya, perbuatannya sampai kepada waktu bekerja yang dimanfaatkannya tetapi semua ini bermaksud bahwa ASN mematuhi peraturan yang berlaku dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya dan semua itu harus dilaksanakan secara terus-menerus. Sikap disiplin juga diperlukan oleh setiap aparatur, karena merupakan sarana untuk melatih kepribadian aparatur sipil negara agar senantiasa menunjukkan kinerja yang baik<sup>36</sup> atau dalam hukum Islam dikenal dengan prinsip Amal Ma'ruf Nahi Munkar.

Disiplin dalam pekerjaan adalah sifat dan perbuatan terpuji yang di dalamnya terdapat kesabaran, ketaatan, kepatuhan, keuletan, ketekunan, dan lainnya. Karena dengan disiplin seseorang akan mudah dan lancar dalam mencapai tujuan.

Perilaku disiplin ini tercermin dari sikap, ucapan dan pemanfaatan waktu bekerja bagi seorang ASN, serta ketaatannya pada aturan yang ada. Disiplin dapat memberi manfaat, tanpa disiplin kita tidak mendapat manfaat serta dengan disiplin terjadi ketertiban.

ASN dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, wajib bermoral dan menerapkan nilai-nilai moral baik yang terkandung dalam *Rukun Iman* maupun terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai pemerintah, serta pelayan masyarakat. Dengan demikian, disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mencerminkan kinerja pemerintah yang

---

<sup>34</sup> Pasal 1 Angka 1, "Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara".

<sup>35</sup> Sedarmayanti, "Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja" (Jakarta : Mandar Maju, 2016), 33.

<sup>36</sup> Maria Margareta, "Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau", Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan, NIM. E1031151050.

mengisyaratkan bahwa nilai budaya disiplin mewarnai perilaku pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan melalui akhlak dan adab.<sup>37</sup>

## B. Definisi Aparatur Sipil Negara dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) Hukum Islam mengenalnya dengan istilah "*Tabi'in*" yang berarti "Pengikut" atau orang yang menjumpai sahabat Nabi SAW. dalam keadaan beriman dan mati dalam iman Islam.<sup>38</sup> Menurut bahasa, *tabi'in* merupakan bentuk jamak dari kata *Tab'i* atau *Tabi'un*. Kata *Tabi* adalah isim fail dari kata *Tabi'a* yang bermakna "berjalan dibelakangnya".<sup>39</sup>

Seorang *Tabi'in* adalah orang-orang yang mentaati perintah-perintah Rasul, mengikuti dan mematuhi guru-gurunya (pemimpin) atau dalam Islam dikenal dengan "*Ulil Amri*".<sup>40</sup> Seperti manusia pada umumnya, seorang pengikut harus berperilaku terpuji, menjaga lisannya dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebagaimana mereka mentaati atauran-aturan yang ada. Seperti yang difirmankan oleh Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am Ayat 153 berbunyi :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣

*"Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu*

<sup>37</sup> Sepa Erni, "Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 8, No. 3 (2019), 59.

<sup>38</sup> Junaid Bin Junaidi, "Aktualisasi Tabiin Perempuan Dalam Periwatan Hadis", An-Nisa', No. XI, (2018): 299, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/Annisa/Article/Download/297/224>.

<sup>39</sup> Luis Ma'luf, "Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam" (Beirut : Darul Masriq, 1992), 45.

<sup>40</sup> Al-Alusi, "Tafsir Ruh al-Maani", Juz 5, 65, <http://digilib.uinsby.ac.id/552/5/Bab%202.Pdf>.

*diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.” (Q.S. Al-An’am [06] : 153)<sup>41</sup>*

Diperlukan sebuah aturan-aturan yang dapat menjaga perilaku manusia dan ditaati, sehingga perilakunya tetap berjalan sebagaimana yang terdapat dalam aturan yang berlaku. Begitu pula seseorang ASN harus berperilaku, menajaga lisannya dan memanfaatkan waktu bekerjanya dalam melayani masyarakat karena jika melanggarnya hanya akan menyengsarakan diri sendiri akibat dirinya yang telah berbuat kezoliman dan berperilaku sia-sia. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra Ayat 15, yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝ ١٥

*“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (Q.S. Al-Isra’ [17] : 15)<sup>42</sup>*

Berbeda dengan Hukum Islam yang mengartikan ASN sebagai seorang pengikut yang mentaati aturan-aturan yang berlaku, Hukum Positif mengartikan ASN dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 Angka 1 sebagai berikut : *“Aparatur Negeri Sipil yang kemudian disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”<sup>43</sup>*

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *“Al- Hikmah Al-Qur’an Dan Terjemahan”* (Bandung : CV. Diponegoro, 2010), Cet. Ke- 10, 149.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, 283.

<sup>43</sup> Pasal 1 Angka 1, *“Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Aparatur Sipil Negara”*.

Bagi Hukum Positif ASN diartikan sebagai pegawai negeri sipil yang dalam hal ini adalah Aparatur Negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dalam mentaati Pancasila, UUD RI 1945, negara dan pemerintah yang memberikannya tanggung jawab dan kewenangan dengan disertai tugas dalam suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diberikan hak atas jerih payahnya bekerja sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

ASN menurut Hukum Islam dan Hukum Positif adalah seseorang yang mentaati dan mematuhi aturan-aturan yang ada dan berlaku, bersikap adil, bermoral dan berbudi pekerti luhur, beradab dan berakhlak mulia untuk kemudian diterapkan dalam upaya pelayanan masyarakat, sehingga terciptanya sebuah kebijaksanaan dan keadilan pada instansi pemerintahan dan masyarakat.

### **C. Asas-Asas Aparatur Sipil Negara pada Hukum Islam dan Hukum Positif**

Seorang Aparatur Sipil Negara sebagai suri tauladan bagi masyarakat yang dimana sikap dan perilakunya harus baik dan memiliki integritas yang tinggi dalam pelayanan publik. Pelaksanaannya harus menciptakan suasana yang nyaman, tentram, dan aman di lingkungan pemerintahan atau instansi. **Hukum Islam** mewajibkan seorang yang bekerja di lingkungan pemerintahan harus memiliki akhlak dan adab untuk berperilaku sebagai berikut :

#### **a. Menjunjung Tinggi Keadilan**

Adil dalam arti kata sebenarnya ialah orang yang mengerjakan kewajibannya serta menjauhkan diri dari segala maksiat serta menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan adil dalam arti luas dimaksud menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan serta dapat menjaga kehormatan dirinya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*" (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo Bandung, 2006), Cet. Ke-39, 500.

Seperti yang ditegaskan Allah Swt. dalam Al-Qur'an pada Surat An-Nisa' Ayat 58, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa' [04] : 58)<sup>45</sup>*

Ini berarti bersikap adil bagi seorang ASN menjadi asas yang penting bagi dirinya dalam pelayanan masyarakat, sehingga dirinya terhindar dari bersikap dzolim kepada dirinya dan orang lain. Serta bersikap adil wajib hukumnya untuk diterapkan oleh ASN dalam mencapai tujuan instansinya.

#### **b. Jujur / dapat dipercaya dan amanah**

Bersikap *jujur* bagi seorang ASN berarti segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dikatakan dengan penuh kebenaran tidak melebih-lebihkan dan tidak pula mengurangi-ngurangi informasi yang diketahuinya. Seperti yang telah diperintahkan Allah Swt. di dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 42, yang berbunyi :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢

*“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (Q.S. Al-Baqarah [02] : 42)<sup>46</sup>*

Bersikap *amanah* berarti seorang ASN wajib untuk menjaga segala informasi, tidak mengumbar segala perintah yang

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, 45., n.d.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *"Al- Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahan"* (Bandung : CV. Diponegoro, 2010), Cet. Ke- 10, 7.

diterimanya demi kebaikan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal. Seperti yang diperintahkan Allah Swt. di dalam Q.S Al-Anfal Ayat 27, yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”* (Q.S. Al-Anfal [08] : 27)<sup>47</sup>

ASN sebagai *Tabi'in* (pengikut) sudah menjadi kewajiban terhadap dirinya untuk menanamkan sikap jujur dan amanah kepada pemimpinnya dan kepada masyarakat yang dilayaninya.

### c. Profesionalitas

Bersikap profesional seorang ASN berarti dia bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mengerjakan kebajikan dan menghindari dari pada keburukan bagi instansinya untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.

Seperti yang telah Allah Swt. tegaskan di dalam Q.S. Al-Bayyinah Ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ٧

*“Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan (pekerjaan yang baik), mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.”* (Q.S. Al-Bayyinah [98] : 7)<sup>48</sup>

Serta terdapat juga dalam sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah R.a, berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبري والبيهقي)

*“Dari Aisyah R.a., sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda : “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional.”* (HR. Thabrani, No : 891, Baihaqi, No: 334).<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, 180.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, 180.

<sup>49</sup> Kitab Buluhul Maram, 110.



Dikatakan profesional berarti seorang ASN haruslah bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah diterimanya sebagai profesi yang ditugaskan kepadanya dan tetap berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### d. Amal Ma'ruf Nahi Munkar

Di dalam asas ini, seorang ASN berkewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik. ASN juga bekerja dengan kebaikan dan menghindari diri dari perbuatan buruk yang akan membuatnya kesulitan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai pemerintah.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran Ayat 110, yang berbunyi sebagai berikut :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

*“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang maruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Ali-Imran [03] : 110)<sup>50</sup>*

#### e. Bertanggung Jawab

Setiap orang bekerja termasuk seorang ASN mereka wajib bertanggung jawab atas tugas yang telah diembannya dalam satu profesi yang dijalankannya. Mereka wajib memenuhi perintah yang pemimpinnya berikan kepadanya jika itu berada pada jalan kebaikan, serta mereka bertanggung jawab atas pelayanan maksimal yang dilakukannya demi melayani masyarakat dan instansinya berdasarkan peraturan yang ada. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anfal Ayat 24, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, 64.

"Wahai orang-orang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan." (Q.S. Al-Anfal [08] : 24)<sup>51</sup>

Sejalan dengan Hukum Islam, **Hukum Positif** mengenal asas-asas tersebut sebagai prinsip dari *Good And Clean Governance*, yaitu pemerintahan yang baik dan bersih. Aparatur Sipil Negara harus berpegang pada prinsip *Profesionalitas* dan *Integritas* aparatur pemerintah bahwa perubahan paradigma aparatur negara dari suatu birokrasi atau instansi menjadi birokrasi populis (Pelayanan Publik) harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral, sehingga tercermin pelayan pemerintah yang bersih dan berwibawa.<sup>52</sup> Hal tersebut juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pegawai negeri sipil untuk berpegangan pada nilai-nilai dasar bagi pegawai negeri sipil<sup>53</sup> yaitu :

1. Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesetiaan dan Ketaatan kepada Pancasila dan UUD RI 1945;
3. Semangat nasionalisme dan Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
4. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
5. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Tidak diskriminatif;
6. Profesionalitas, netralitas dan bermoral tinggi dan Semangat jiwa korps.

Kesembilan nilai-nilai dasar ini sangat sejalan dengan asas-asas yang terdapat dalam Hukum Islam dimana setiap bekerja, ASN wajib beriman kepada Tuhan, bersikap moral yang tinggi,

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, 180.

<sup>52</sup> A. Ubaedillah, "*Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*" (Jakarta : KENCANA, 2015), Cet. Ke – 2, 218.

<sup>53</sup> Bab III Pasal 6 Huruf A-i, "*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*".

profesional, dan bertanggung jawab atas semua tugas yang diembannya dalam satu profesi sebagai aparatur pemerintahan.

#### **D. Definisi Pemekaran Wilayah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Pemekaran wilayah berarti terbentuknya suatu wilayah baru baik itu berada pada tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, atau tingkat Kecamatan. Kemudian wilayah yang baru terbentuk tersebut menjadi daerah pemekaran yang akan berkembang dan bertumbuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hukum Islam memahami pemekaran wilayah sebagai perluasan wilayah perkembangan daerah kekuasaan keislaman yang terjadi dimasa kekhalifahan Umar Bin Khattab Ra.<sup>54</sup>

Beberapa mengatakan bahwa Hukum Positif mengenai pemekaran wilayah dianggap sebagai pemecahan masalah bagi Otonomi Daerah sehingga daerah tersebut dapat berkembang dengan cepat dan maksimal secara efektif dan efisien. Pemekaran juga berarti pemecahan suatu wilayah tertentu menjadi beberapa wilayah baru yang tetap berfokus pada wilayah induk atau wilayah yang lama dan lebih dahulu terbentuk. Di dalam peraturn perundang-undangan dikatakan bahwa ada 2 upaya dalam Penataan Daerah<sup>55</sup> yaitu melalui cara :

1. Pemekaran Daerah; dan
2. Penggabungan Daerah.

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa sebuah pemekaran daerah terjadi berupa pemecahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan menjadi dua atau lebih daerah baru.<sup>56</sup> Menurut hukum Islam pemekaran wilayah merupakan perluasan wilayah pemerintahan keislaman untuk mengembangkan penyebaran agama Islam dengan tujuan memperbaiki sistem pemerintahan negara dan mening-

---

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, “ *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Cet. Ke-1, 2014, 63.

<sup>55</sup> Bab VI Bagian Kedua Pasal 32 Angka 1, "Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

<sup>56</sup> Bab VI Bagian Kedua Pasal 33 Angka 1 Huruf a, "Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

katkan kesejahteraan umat.

Hukum Positif mengartikan pemekaran wilayah sebagai terbentuknya daerah baru akibat penataan daerah melalui cara memecah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan menjadi satu atau lebih daerah baru dengan tujuan mempercepat pengembangan dan pertumbuhan otonomi daerah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

## **E. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia**

### **1. Pengertian ASN pada Peraturan Perundang-Undangan**

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan ASN telah ditegaskan dan diperjelas dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dengan redaksi sebagai berikut : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”<sup>57</sup> Pegawai Sipil Negara atau disingkat PNS adalah pegawai ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dan suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

### **2. Prinsip dan Asas Pada Kode Etik dan Perilaku ASN**

Sebagai aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi hal wajib bagi seorang ASN berpegang teguh dan mentaati Prinsip dan Asas yang terdapat dalam kode etik dan perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Bab II Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu :

ASN sebagai profesi berlandaskan kepada 7 prinsip diantaranya :

1. Nilai dasar;
2. Kode etik dan kode perilaku;

---

<sup>57</sup> Bab 1 Pasal 1 Angka 1, "Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara".

<sup>58</sup> Bab 1 Pasal 1 Angka 2, *Ibid*.

3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Kualifikasi akademik;
6. Jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas; dan
7. Profesionalitas jabatan.

Sedangkan asas yang dipergunakan dalam pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN, yaitu :

1. Kepastian hukum;
2. Profesionalitas dan Proporsionalitas;
3. Keterpaduan dan Keterbukaan;
4. Delegasi;
5. Netralisasi dan Akuntabilitas;
6. Efektif dan efisien;
7. Nondiskriminatif;
8. Perstuan dan kesatuan;
9. Keadilan, Kesetaraan dan Kesejahteraan.

Keberadaan asas dan kode etik yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan menjadi dasar bagi aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dan berkerja dengan sangat berhati-hati dan mengutamakan pelayanan dengan tetap mewujudkannya ke dalam sebuah tindakan perilaku yang baik untuk menghadapi segala kebutuhan masyarakat untuk hal yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Mewujudkan sikap atau perilaku yang tertuang di dalam peraturan yang menyangkut aparatur sipil negara bukanlah hal yang mudah. Kinerja ASN akan terus dipantau oleh pemerintah untuk terus mewujudkannya dalam perilaku kesehariannya saat menghadapi masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Ketika asas dan kode etik yang ada dilaksanakan oleh seorang ASN dengan baik, bukan tidak mungkin kinerja instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Program kerja yang dibuat akan terus

terselenggara dan terselesaikan dengan lancar, begitu juga dengan masyarakat akan terus menjadi masyarakat yang proaktif dalam menggunakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Pendataan baik kependudukan dan sebagainya akan memiliki kejelasan dan keakuratan data. Pendataan yang jelas dan akurat yang telah dilakukan oleh pegawai pemerintah akan menjadi dasar dan bekal bagi pemerintah untuk kemudian mengetahui akan mengambil langkah apa berikutnya dalam hal perkembangan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik. Serta pemerintah dapat mengidentifikasi langkah apa yang diperlukan Aparatur sipil negara untuk menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat yang membutuhkan.

### 3. Etika dan Perilaku ASN

Bagi seorang ASN etika dan perilaku dipandang penting dalam menjunjung citra baik instansi pemerintah dimana mereka dipekerjakan, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada BAB IV (Pasal 7 sampai Pasal 12) dijelaskan secara rinci, yaitu : “Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dan dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.”<sup>59</sup>

Penting bagi ASN sebuah etika dan perilaku untuk menjaga nama baik negara, instansi pemerintahan, masyarakat, sampai kepada diri sendiri dan sesama pegawai. Pelayanan pemerintah akan berkembang secara cepat, efisien dan efektif dengan sumber daya manusia yang beretika dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral

---

<sup>59</sup> Bab 4, Pasal 7-Pasal 12 , "Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil".

yang ada dalam Pancasila, Pembukaan UUD RI 1945, sampai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai ASN, sehingga akan terciptanya pemerintah dan masyarakat yang responsif dan berkembangnya nilai-nilai demokratis.

#### **4. Hak dan Kewajiban ASN dalam Melayani Masyarakat**

Sebagai pelayan masyarakat sekaligus aparatur pemerintahan, pemerintah memberikan hak dan kewajiban bagi seorang ASN dalam menjalankan tugasnya dan dalam kehidupan sosialnya, diantaranya mereka berhak memperoleh :

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. Cuti;
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. Perlindungan; dan
5. Pengembangan kompetensi.<sup>60</sup>

Sedangkan kewajiban seorang ASN, yaitu sebagai berikut :

1. Setia dan taat terhadap Pancasila, UUD RI 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang;
4. Mentaati peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan pertanggung jawaban;
6. Menjunjung integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Bab VI Pasal 21, "Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara".

Hak dan kewajiban ASN dalam pelayanan masyarakat keberadaannya sangat diperlukan. **Yang Pertama**, hak ASN diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi ASN dalam melaksanakan kinerja pemerintahan. **Yang Kedua**, kewajiban ASN yang diatur pemerintah akan melindungi masyarakat, secara tidak langsung menuntut seorang ASN untuk membantu masyarakat dengan memberikan pelayanan yang sangat memuaskan yang kemudian akan menjadikan masyarakat percaya dengan kinerja pemerintah yang dipilihnya.

## 5. Disiplin ASN pada Peraturan Perundang-Undangan

Disiplin Aparatur Sipil Negara Adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.<sup>61</sup> Kedisiplinan ASN tidak hanya dilihat dari ketepatan dan pemanfaatan waktu kerja yang ia lakukan. Tetapi bagian dari kedisiplinan yang dimaksud pemerintah kemudian dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan saat ini menyangkut :

- a. Waktu Kehadiran;
- b. Indeks Kinerja; dan
- c. Upaya pelayanan yang telah dilakukan dan diberikan kepada masyarakat;

Kedisiplinan menjadi kunci utama bagi pemerintah untuk membuat masyarakat nyaman dan percaya dengan keberadaan dan kinerja pemerintah yang sudah baik dan bermasyarakat. Untuk itu pemerintah mempekerjakan ASN sebagai wakil bagi pemerintah pusat untuk menjalankan tugasnya dan berhadapan langsung ke dalam masyarakat.

---

<sup>61</sup> Bab VI Pasal 23, "Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara".

<sup>62</sup> Pasal 1 Ayat (1), "Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil".



Disiplin ASN jika dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan mempercepat pemerintah untuk pencapaian target dari program kerja yang dibuat. Sehingga akan terus menjalankan program kerja berikutnya dan menciptakan program kerja yang baik demi pelayanan masyarakat yang memuaskan. Hal tersebut sangat bertolak ukur dengan perilaku disiplin yang dilakukan seorang ASN di instansi pemerintahannya.

#### **6. Hukuman Disiplin bagi ASN yang Melakukan Pelanggaran**

Bagi ASN yang melakukan pelanggaran dan diketahui tidak mentaati aturan yang ada, maka akan berlaku *hukuman disiplin*. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi pegawai. Ada kalanya seorang ASN akan sengaja dan tanpa sengaja melakukan perilaku pelanggaran dengan kata lain perbuatan diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tentunya akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi pimpinan dan juga roda pemerintahan.

Karena jika hal tersebut terjadi bukan tidak mungkin kepercayaan dan rasa yakin masyarakat dengan kinerja pemerintah akan turun secara drastis dan masyarakat akan menganggap bahwa pemerintah hanya bermain-main dan mempermainkan masyarakat dalam urusan kenegaraan.

Disinilah hukuman disiplin diperlukan dan menjadi langkah bagi pemerintah untuk menyadarkan pegawainya yang melakukan pelanggaran. Kemudian pemerintah menginginkan ASN tetap berada dalam koridor dan aturan yang telah diberlakukan pemerintah untuk dipatuhi oleh seluruh pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah disetiap instansi-instansi pemerintah. Hukuman adalah langkah yang dianggap paling baik yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya. Ini menjadi solusi bagi pemerintah agar rasa puas dan kepercayaan masyarakat dengan kinerja yang dilakukan pemerintah tetap tumbuh dan berdiri dengan kuat,

tidak tercipta keraguan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

#### F. Pengukuran Perilaku Disiplin

Pengukuran perilaku disiplin bagi ASN atau Pegawai Pemerintah merupakan upaya yang perlu diperhatikan guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, sehingga dapat menuju pada tercapainya pelayanan yang Prima. Diantaranya yang menjadi aspek penting dalam pengukurannya ada 3 (tiga), yaitu :

##### 1. Waktu Kehadiran atau Jam Kerja

Waktu dalam Hukum Islam merupakan perkara yang sangat penting, Islam mengajarkan disiplin melalui penerapan pelaksanaan Ibadah dan sampai kepada perilaku bekerja manusia. Seperti yang diriwayatkan oleh **Abu Daud** dari **Abu Qatadah bin Rib'iy** mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Allah Ta’ala berfirman : “Sesungguhnya Aku mewajibkan umatmu shalat lima waktu, dan Aku berjanji bahwa *barangsiapa yang menjaga waktu-waktunya pasti Aku akan memasukkannya ke dalam surga, dan barangsiapa yang tidak menjaganya maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan*”<sup>63</sup>.

Jam kerja yang baik akan sangat berpengaruh dengan keberhasilan seseorang mencapai tujuan kerjanya. Hadist tersebut mengungkapkan bahwa setiap orang termasuk pegawai pemerintah yang mempergunakan waktunya dengan baik dengan maksud melaksanakan tugasnya tepat waktu dan tidak mengulur-ngulurnya atau terlambat, mereka akan mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari pimpinannya.

Mereka yang tepat waktu dalam hal hadir kerja, akan menjadi sorotan bagi masyarakat bahwa masyarakat tidak salah memilih pemimpin dan rasa percaya masyarakat akan tumbuh dan berkembang dengan baik yang kemudian program kerja yang dicita-citakan pemerintah dapat dirasakan masyarakat dengan cepat dan tepatnya masyarakat akan

---

<sup>63</sup>AbuDaud, "*KitabShalat : MenjagaWaktuShalat*", Hadist366, [http://Mqtebuiireng.Softether.Net/Hadis9/Kitab\\_sunan\\_abu\\_daud\\_open.Php?Imam=abudaud&nohdt=366&page=15](http://Mqtebuiireng.Softether.Net/Hadis9/Kitab_sunan_abu_daud_open.Php?Imam=abudaud&nohdt=366&page=15)."

memiliki rasa kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai.

## 2. Indeks Kinerja

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang dipergunakan dengan tujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Sehingga, tingkat profesionalitas dalam penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan semaksimal mungkin.

Indeks Kinerja juga dipergunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan oleh ASN dalam perilaku kerjanya. Sebuah Indeks Kinerja yang dimiliki seorang ASN hasilnya harus menunjukkan sebuah peningkatan dari indeks kinerja sebelumnya, hal ini bertujuan dalam perkembangan sistem Birokrasi pada pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik lagi, juga mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.<sup>64</sup>

## 3. Pelayanan Kepada Masyarakat

Pemerintah memerlukan aparat yang adil dan cakap serta bekerja sesuai dengan aturan yang diberlakukan.<sup>65</sup> Salah satunya tugas yang dilakukan oleh pegawai ASN yaitu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya adalah terselenggaranya pelayanan prima. Pegawai ASN harus sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat. Sehingga, pelayanan yang diberikan harus diupayakan semaksimal mungkin agar masyarakat merasakan secara langsung perhatian dari pemerintah pusat.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pemberi layanan publik menjadi pihak yang sering dikritik oleh masyarakat karena perasaan kurang puas atas pelayanan yang diterima di instansi pemerintah. Sehingga ASN dituntut untuk mampu

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>65</sup> Imam Khomeini, "*PEMERINTAHAN ISLAM* " (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), 46.

mengatasi masyarakat dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.<sup>66</sup>

Pemberian pelayanan yang prima, ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil melaksanakan sistem pemerintahannya melalui kinerja yang dijalankan oleh ASN di lingkungan instansi pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah telah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemberian layanan yang maksimal bagi masyarakat.

#### **G. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN yang Melakukan Pelanggaran**

Setiap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang ASN maka berlakulah Hukuman Disiplin. Tata cara atau mekanismenya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Pasal 3, diantaranya yaitu :

1. Melanggar Sumpah atau Janji kepegawaian tanpa alasan yang sah;
2. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
3. Menyalahgunakan wewenang;
4. Ikut serta dalam urusan politik (Kampanye);
5. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
6. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan sebagainya.

Hukum Islam mengkhaskan seorang pegawai pemerintah itu harus memenuhi amanah yang telah mereka ucapkan pada saat mengucapkan sumpah atau janji kepegawaian. Sebagaimana yang telah Allah SWT. perintahkan pada Q.S. An-Nisa' Ayat : 58, yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

---

<sup>66</sup> Ferry Panjaitan, "Implementasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Pelayanan Internal", Jurnal Manajemen Dan Bisnis (JMB), Vol. 18, No. 1, 73.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’ [04] : 58)<sup>67</sup>*

Sebagaimana telah jelas setiap sumpah atau janji yang diucapkan oleh ASN akan menjadi tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Mereka yang tidak menepati amanahnya akan mendapatkan balasan atas perbuatannya dan hanya Allah SWT. yang mengetahui hukuman yang akan didapatkan dari perbuatan yang telah dilanggarnya.

Undang – Undang Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dijelaskan dalam Pasal 23 dengan sangat jelas mengenai tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanggilan secara tertulis oleh atasan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan (dilakukan 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan);
2. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi pemanggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua (dilakukan 7 hari setelah tanggal pemanggilan pertama);
3. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi pemanggilan pertama dan kedua, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti dan keterangan tanpa adanya pemeriksaan;
4. Hukuman Disiplin akan berlaku setelah diterimanya surat keputusan oleh PNS yang melakukan pelanggaran dari pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman.

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, 45.

Setiap pelanggaran akan menjadi sebuah masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan, karena dalam setiap pelanggaran akan menghasilkan sebuah penjatuhan hukuman yang kemudian akan dibebankan kepada pelanggarnya.

Cukup sulit bagi seorang ASN karena penjatuhan hukuman disiplin akan membuat seorang ASN dapat kehilangan hak dan tanggung jawabnya sebagai pegawai pemerintah. Penjatuhan hukuman disiplin diperlukan tahapan-tahapan yang melibatkan pelanggar hingga pemeriksaan bukti-bukti yang memperkuat dan membuktikan bahwa ASN tersebut terbukti benar melakukan pelanggaran.

Keberadaan hukuman disiplin disini sebagai langkah untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah yang handal, profesional, dan bermoral. Disiplin bagi ASN mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam menegakan perilaku disiplin yang dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban serta mendorong ASN untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja atau kinerja.<sup>68</sup>

Peraturan yang menyangkut Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar dengan sengaja oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>69</sup>

Penjatuhan hukuman disiplin wajib dilaksanakan ketika ditemukan bukti yang cukup dari Pegawai Negeri Sipil atau ASN yang melakukan pelanggaran. dan penjatuhan hukumannya dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan

---

<sup>68</sup> Acacio Frenande Vassalo, "Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Good Governance Di Timor Leste", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 03 (2014).

<sup>69</sup> Moh. Mahfud, "Hukum Kepegawaian Indonesia" (Yogyakarta : Liberty, 1998), 121.

tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan.<sup>70</sup> Sanksi hukuman disiplin meliputi : hukuman disiplin Ringan, Sedang dan Berat.<sup>71</sup> Nantinya diharapkan keberadaan peraturan disiplin menjadi pedoman ASN berperilaku di lingkungan instansi pemerintah.



---

<sup>70</sup> Dimas Adimanggala Danurwenda, Dkk., "Penegakan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2017), 4.

<sup>71</sup> Yulita Sari, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Samarinda Utara", *E.Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2 (2015), 9.

kreatifitas dan inovatif dapat berkembang dan memperkaya program kerja yang ada di kelurahan.

2. Pemerintah melalui instansi kelurahan harus menyebar luaskan perilaku disiplin ASN bagi wilayah lama dan wilayah baru yang menjadi wilayah pasca pemekaran melalui sosialisasi terhadap : Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara; dan PP Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi pajangan yang diletakan disetiap sudut yang ada di kelurahan agar saat terbaca hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran iman bagi ASN untuk meningkatkan perilaku disiplinnya sebagai pegawai pemerintah.





## DAFTAR RUJUKAN

### Al-Qur'an Nur-Karim

- A. Ubaedillah, *"Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi"*, Jakarta : KENCANA, 2015.
- A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG.NG. Indra S. Ranuh, *"Teori Hukum"*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Abadi Praja Dharma Satya Negara Bhakti, *"Tingkatan Dan Jenis Hukuman Disiplin PNS"*, Info ASN, 2019, <https://infoasn.id/disiplin-pns/tingkat-dan-jenis-hukuman-disiplin-pns.html>.
- Abdul Kadir Muhammad, *"Hukum Dan Penelitian"*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Abu Daud, *"Kitab Shalat : Menjaga Waktu Shalat"*, Hadist 366, [http://mqtebuiireng.softether.net/hadis9/kitab\\_sunan\\_abu\\_daud\\_open.php?imam=abudaud&nohdt=366&page=15](http://mqtebuiireng.softether.net/hadis9/kitab_sunan_abu_daud_open.php?imam=abudaud&nohdt=366&page=15).
- Acacio Frenande Vassalo, *"Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Good Governance Di Timor Leste, Jurnal Masalah-Masalah Hukum"*, Vol. 43, No. 03, 2014.
- Agus Dwiyanto, Dkk., *"REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA"*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2017).
- Agus Dwiyanto, *"Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, Dan Kolaborasi"*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2017.
- Ahmad Nurmadi, *"Manajemen Pelayanan Publik"*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. III, No. 2, Maret 2003, Bab I.
- Ahmad Syafi'i Mufid, *"Integrasi Budi Pekerti Dalam Pendidikan Agama Islam"*, Jakarta : Yudhistira, 2005.

Al-Alusi, "*Tafsir Ruh al-Maani*", Juz 5, 65,  
[Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/552/5/Bab%202.Pdf](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/552/5/Bab%202.Pdf).

Amaruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2014.

Andi Rasyid Pananrangi Dan Murlinah, "*Etika Birokrat*", Makassar : CV. Sah Media, 2017.

Atep Adya Barata, "*Dasar-Dasar Pelayanan Prima*", Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003).

Ayu Widiowati Johannes, "*Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*", Bandung : CV. Cendekia Press, 2020.

Azahra Nasyir, "*Pokok-Pokok Filsafat Hukum Islam*", Yogyakarta : UII Press, 2000.

B. Herry Priyono, Dkk., "*Kratos Minus Demos*", Jakarta : BAKUMSU, 2012.

BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 (Angka 1), "*Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*".

Bab 1 Pasal 1 Angka 1, "*Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*".

Bab 4, Pasal 7-Pasal 12 , "*Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*".

BAB II Pasal 2 (Huruf a-m), "*Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*".

Bab III Pasal 6 Huruf A-i, "*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*".

Bab VI Bagian Kedua Pasal 32 Angka 1, "*Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*".

Bab VI Bagian Kedua Pasal 33 Angka 1 Huruf a, "*Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*".

Bab VI Pasal 21, "*Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*".

Bab VI Pasal 23, "*Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*".

Baharuddin Dan Illy Yanti, "*Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Departemen Agama RI, "*Al- Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahan*", Bandung : CV. Diponegoro, 2010.

Dimas Adimanggala Danurwenda, Dkk., "*Penegakan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Kota Semarang*", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017.

Hellawati, "*Kondisi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera*", Wawancara, November 10, 2020.

Irham, "*Keberadaan Kelurahan Sumberrejo Sejahtera*", Wawancara, Mei 10, 2020.

Fajar Apriyansyah selaku Seklur, "*Kondisi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera*", Wawancara, Februari 8, 2021.

Fantoni selaku Staf Trantib, "*Kondisi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera*", Wawancara, Februari 8, 2021.

Fathul Arifin Toatubun Dan Muhammad Rijal, "*Profesionalitas Dan Mutu Pembelajaran*", Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

Ferry Panjaitan, "*Implementasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Pelayanan Internal*", Jurnal Manajemen Dan Bisnis (JMB), Vol. 18, No. 1.

Hanif Nurcholis, "*Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*", Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005.

- Harris Pratama, "*Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*", Skripsi, Aceh : Universitas Muhammadiyah Aceh, 2020, [Http://Repository.Unmuha.Ac.Id:8080/Xmlui/Handle/123456789/790](http://Repository.Unmuha.Ac.Id:8080/Xmlui/Handle/123456789/790).
- Imam Khomeini, "*PEMERINTAHAN ISLAM* ", Jakarta : Pustaka Zahra, 2002.
- Imam Machali Dan Ara Hidayat, "*The Book Of Education Management*", Jakarta : Kencana, 2018.
- Imam Nahwawi, "*Taman Orang-Orang Shaliha*", Kitab Riyadhus Shalihin, 313, [Http ://Id\\_01\\_Riyad\\_AlSaliheen.Pdf](http://Id_01_Riyad_AlSaliheen.Pdf).
- Ismail Muhammad Syah, "*Filsafat Hukum Islam*", Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- Ismail Nurdin, "*Etika Pemerintahan*", Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Junaid Bin Junaidi, "*Aktualisasi Tabiin Perempuan Dalam Perwayatan Hadis*", *An-Nisa*", No. XI, 2018 : 299, [Https://Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id/Index.Php/Annisa/Article/Download/297/224](https://Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id/Index.Php/Annisa/Article/Download/297/224).
- Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an Dan Terjemahan*", Bandung : CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.
- Kitab Buluhul Maram.
- Luis Ma'luf, "*Al-Munjid Fi al-Lugah Wa al-A'lam*", Beirut : Darul Masriq, 1992.
- M. Ryaas Rasyid, "*Makna Pemerintahan*", Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2000.
- M. Yunan Nasution, "*Pegangan Hidup (3)*", Jakarta : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981.

- Maria Margareta, "*Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau*", Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan, NIM. E1031151050.
- Marzuki, "*Metodologi Riset*", Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983.
- Masleni selaku Kasi Trantib, "Disiplin ASN Kelurahan Sumberrejo Sejahtera", *Wawancara*, November 10, 2020.
- Moh. Mahfud, "*Hukum Kepegawaian Indonesia*", Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Moh. Pabundu Tika, "*Metode Penelitian Geografi*", Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.
- Muhammad Fitri Rahmadana, Dkk, "*Pelayanan Publik*", Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Muhammad Iqbal, "*Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Cet. Ke-1, 2014.
- Nunuhashariani, "Kondisi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera", *Wawancara*, November 10, 2020.
- Nunuhashariani, "Kondisi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera", *Wawancara*, November 10, 2020.
- Nurfadhil Putra, "*Implementasi Dari Disiplin Aparatur Sipil Negara*", Skripsi, Lampung Utara : UIN RIL, 2013.
- Nurmah Samil, "*Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*", Jakarta : Kencana, 2018.
- Panji Adam, "*HUKUM ISLAM (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*", Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Pasal 1 Angka 1, "*Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara*".
- Pasal 1 Angka 1, "*Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Aparatur Sipil Negara*".

Pasal 1 Ayat (1), "*Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*".

Pasal 8 Huruf d, "*PP Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*".

Pasal 32 Bagian 2, "*Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*".

Pasal 229 Ayat 4, "*Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah*".

Pasal 229, "*Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil*".

Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

Rafie, "*Etos Kerja Pada Q.S. Al-Jumu'ah Ayat 9-11*", Dalam Brainly.Co.Id, Jakarta, 2017, <https://brainly.co.id/tugas/12686427#:~:text=Dalam%20ayat.>

Risnanda Fajri, "*Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*", Skripsi, Lampung Selatan : UIN RIL, 2015.

Rohidin, "*Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*", Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rulyanti Susi Wardhani Dan Suhdi, "*Tata Kelola Perguruan Tinggi*", Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020.

Sahya Anggara, "*SISTEM POLITIK INDONESIA*", Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.

Sedarmayanti, "*Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*", Jakarta : Mandar Maju, 2016.

- Sepa Erni, "*Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*", Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 8, No. 3 , 2019.
- Siti Masykuroh Dan Ali Abdul Wakhid, "*Struktur Organisasi Dan Kinerja Pegawai Dalam Perespektif Gender Di UIN Raden Intan Lampung*", Journal Of Psychology, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Socrat Pringgodana, "Hukuman Disiplin ASN Kelurahan Sumberrejo Sejahtera", *Wawancara*, Februari 10 , 2021.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta : PT. RajaGrafinfo Persada, 2013.
- Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo Bandung, 2006.
- Suprianto, "*Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik*", Jurnal Universitas Riau, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Susiadi. AS, "*Metodologi Penelitian*", Bandar Lampung : Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Lampung, 2014.
- Suwantikin, "*Mengenal Mukallaf*", Surakarta : Surakarta Daily, 2014), <https://Surakartadaily.Com/2020/04/Mengenal-Mukallaf/>.
- Teddy Lahati, "*Kewajiban Dan Larangan ASN/PNS (Budaya Kerja)*", Gorontalo : Pengadilan Agama Limbot Kelas I-B, 2018, <https://Pa-Limboto.Go.Id/Tentang-Pengadlan/Kewajiban-Larangan-Asn-Pns.Html>.
- Teddy Minahasa Putra, "*Pelayanan Publik Dan Ketahanan Nasional*", Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- Thalha Alhamid, Budur Anufia, "*Resume Instrumen Pengumpul Data*", Jurnal STAIN Sorong, 2019, 11, Diakses Pada Rabu Tanggal 13 Mei 2020, Pukul : 09.45. Wib.

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

W. Riawan Tjandra, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Wawancara terhadap Ketua Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, pada hari senin, tanggal 11 Mei 2020, pukul 08.32 WIB, didukung dengan data pada laman desa/kampung/pekon/kelurahan di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, 2 April 2020.

Yayu Yunus Hasan, "*Pengaruh Motivasi Dan Penerapan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas Kota Timus, Kota Gorontalo*", Skripsi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2017,  
<https://Repository.Ung.Ac.Id/Skripsi/Show/811412085>.

Yulita Sari, "*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Samarinda Utara*", E.Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2, 2015.

